



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DANA ALOKASI
KHUSUS AFIRMASI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, PERBATASAN, TRANSMIGRASI, DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan upaya-upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar antar kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, perlu dilaksanakan kegiatan penguatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Transmigrasi, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penguatan Dana Alokasi Khusus Afirmasi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Transmigrasi, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DANA ALOKASI KHUSUS AFIRMASI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, TRANSMIGRASI, DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penguatan Dana Alokasi Khusus Afiriasi dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Transmigrasi, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis DAK Afiriasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi;
 - b. menyusun konsep kebijakan, penguatan DAK Afirmasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar;
 - c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan penguatan DAK Afirmasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, transmigrasi, dan pulau-pulau kecil terluar;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan DAK Afirmasi di daerah tertinggal, transmigrasi, perbatasan negara, dan pulau kecil terluar;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis DAK Afirmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2019
TANGGAL 22 FEBRUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
AFIRMASI DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, PERBATASAN, TRANSMIGRASI, DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Keuangan Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Direktorat Udara, Direktorat Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Bagian Perencanaan Umum, Biro Perencanaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

7. Dra. Hindun ...

7. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Andri N.R. Mardiah, ST, M.Bus, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Erna Gustina Norrista, SP, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Syifaa Tresnaningrum, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati